

KEGAGALAN DEKOLONISASI & ILEGAL REFERENDUM DI PAPUA BARAT



Disusun Oleh:

JOHN ANARI, S. Komp

**WEST PAPUA LIBERATION ORGANIZATION
(WPLO)
WEST PAPUA NEW GUINEA
2011**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perlindunganNya, pertolonganNya, pemberkatanNya, serta pemberian hikmat dan talenta kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini.

Tulisan ini disusun sebagai pelengkap tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan Sejarah Papua karena Penulis melihat bahwa banyak diterbitkan buku-buku tentang Sejarah Papua tetapi masih minim dengan foto-foto sebagai bukti yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, dalam tulisan yang diberi judul **Analisis Penyebab Konflik Papua dan Solusinya Secara Hukum Internasional**, Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk melampirkan data-data dan dokumen pendukung lainnya seperti gambar, table, piagam, dll.

Melalui tulisan ini, para pembaca dapat mengetahui Akar Pokok Permasalahan Papua serta dapat mengerti tentang Bagaimana Mencari Solusi Untuk Menyelesaikan Konflik Papua yang telah berlangsung ± ½ abad sehingga Penduduk Pribumi Papua dapat hidup tenang di atas Tanah Leluhur mereka serta tidak diperlakukan semena-mena oleh Penduduk Pribumi lainnya dari Indonesia seperti Pribumi Jawa, Pribumi Sumatra, Pribumi Sulawesi, Pribumi Maluku, dll. Tuhan telah memberikan tempat kepada setiap Pribumi di dunia, oleh sebab itu Pribumi lain tidak boleh melanggar Hak-hak Pribumi di tempat lain demi terciptanya Perdamaian dan Ketentraman di atas muka Bumi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Anggota *West Papua Interest Association (WPIA)*, *Papua Indigenous Action (PIA)*, *West Papua Indigenous Soldier (WPIS)*, *Association of West Papua Indigenous Students & Youth (AWPISY)*, *West Papua Woman Indigenous Association (WPWIA)*, *Sentral Intelligent Papua (SIP)* serta Organisasi Pembebasan Papua Barat (*OPPB*). Selain itu, tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada mantan anggota *Nieuw Guinea Raad (NGR)*, Presidium Dewan Papua (PDP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Jaringan Independent untuk Aksi Kejora (JIAJORA), Dewan Adat Papua (DAP), *West Papua National Coalition (WPNC)*, *West Papua National Authority (WPNA)*, *West Papua Peoples Front (WPPF)*, *West Papua New Guinea Congress (WPNGC)*, Viktoria Generasi Papua (VGP), Dewan Masyarakat Adat Koteka (DEMAK), *International Parliament for West Papua (IPWP)*, *International Lawyer for West Papua (ILWP)*, Liga Perjuangan Nasional Revolusi Papua Barat (LPNR-PB), Front PEPERA, Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua (SONAMAPA), *mantan anggota Papoea Vrijwilliger Korps (PVK)*, Tentara Pembebasan Nasional (TPN), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mantan anggota Organisasi Perjuangan Papua Merdeka (OPPM) yang dibentuk tahun 1965 di Manokwari yang kini disebut OPM, serta ucapan rasa terima kasih yang paling dalam kepada seluruh ahli waris Tanah New Guinea dari Sorong sampai Samarai.

Melalui perjuangan panjang yang melelahkan namun akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan juga, serta akan dipublikasikan melalui website OPPB pada link: <http://www.oppb.webs.com> atau <http://www.westpapua.page.tl> atau www.oppb.org. Tulisan ini akan disusun dalam dua bahasa yaitu Inggris dan Melayu sehingga seluruh Makhluk Tuhan dapat membuka mata untuk melihat penderitaan orang Papua dan menolong sesama sebagai umat ciptaan Tuhan yang sama di mata Tuhan.

Penulis sadari bahwa tentu tak ada gading yang tak retak, oleh sebab itu kritik dan saran diperlukan guna menyempurnakan tulisan ini. Yang dapat dikirim langsung melalui email admin@oppb.org atau john.anari@oppb.org atau wplo.papua@gmail.com.

West Papua New Guinea,
1 Juni 2010

John Anari, S.Komp

PREAMBULE

Every Peoples in this World have the Rights to be Free and no one can't took their rights. Their rights in Politic, Economic, Society and Cultural are the fundamental freedom to keep peace in this world.

The rights of Indigenous Peoples are the primary rights that were Declaration by the United Nations on 13 September 2007 to protect the Colonizer action in this world. And West Papua as the one Civil Society have the rights to Self Determination according to International Civil & Political Rights article 1.

So, we are the West Papua Indigenous Peoples who joint in West Papua Liberation Organization (WPLO) want to protect our rights also as the indigenous peoples in West Papua Island.

Finally, in the name of the Lord, this Constitution was established as the indicator of WPLO work to protect the rights of West Papua Indigenous Peoples.

West New Guinea, 25 December 2008
Signature;

John Anari, IT. Eng
Executive Chairman